

# LAPORAN KINERJA KETUA BAWASLU MAMUJU TENGAH

Triwulan 3  
2024



# LAPORAN KINERJA KETUA BAWASLU MAMUJU TENGAH

Triwulan 3  
2024



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan 3 Ketua merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang dilaksanakan pada Triwulan 3 Tahun 2024 yang akan dijadikan patokan Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Triwulan 3 Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat kabupaten atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 Tiwulan 3 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan

dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk “*Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya*” dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 3 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.

Mamuju Tengah, 8 November 2024



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Meskipun Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024, tetapi pelaksanaan tahapan Pemilu belum sepenuhnya selesai, terutama untuk Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahapan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD yang berakhir pada 20 Oktober 2024. Sekitar Kurang Lebih 94.309 Jumlah Pemilih Tetap sudah melakukan Pemilihan Presiden dan Wapres, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD di 514 TPS yang menyebar di Kabupaten Mamuju Tengah. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah turut hadir dan memberikan peran yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai garda terdepan dalam Pengawasan setiap Tahapan Pemilu Tahun 2024 agar dapat dilaksanakan secara demokratis, Bermartabat dan Berkualitas sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 juga menjadi sorotan yang tidak bisa dilewatkan. Setiap tahapan yang sudah dilalui dari Mulai Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan pelaksanaan Logistik dan Kampanye Pemilihan Serentak 2024 sedang berlangsung sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Hadir turut serta mengawal pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 agar dapat dilaksanakan secara LuberJurdil.

Dalam rangka mewujudkan visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya” tidak lepas dari adanya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terarah dan terencana. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc tidak lepas dari adanya indikator yang mendukung didalamnya yaitu terdapat 5 (lima) daerah yang dapat diakui yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi serta penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang sudah mencapai 99% Pada Tahapan Pemilu Tahun 2024 menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan Tahapan Pemilihan yang sudah mencapai 62.5% yang diakui pada Triwulan 3 Tahun 2024.

Kegiatan-kegiatan Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pelaksanaan Program yang sebagian besar termasuk dalam Program Nasional pada Program CQ (Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu) yang tidak lepas dari pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada setiap Tahapannya.

Berdasarkan hal tersebut, Berikut Berikut Realisasi Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d. TW 2	Progres s.d. TW 2 (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6	5	85
	Percentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	83%	83%

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	I
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	III
<b>DAFTAR ISI .....</b>	V
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	VI
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	VII
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	VIII
<b>BAB I .....</b>	1
<b>PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. <b>LATAR BELAKANG .....</b>	1
1.2. <b>MAKSUD DAN TUJUAN .....</b>	2
1.3. <b>TUGAS DAN FUNGSI.....</b>	3
1.4. <b>STRUKTUR ORGANISASI .....</b>	5
<b>BAB II .....</b>	8
<b>DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....</b>	8
2.1. <b>PERJANJIAN KINERJA.....</b>	8
2.2. <b>PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA PER SASARAN KEGIATAN .....</b>	9
2.3. <b>AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN CAPAIAN OUTPUT .....</b>	15
A. Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja.....	15
B. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja .....	16
C. Capaian Output.....	17
<b>BAB III .....</b>	19
<b>PENUTUP .....</b>	19
3.1. <b>KESIMPULAN .....</b>	19
3.2. <b>SARAN/REKOMENDASI.....</b>	20
<b>LAMPIRAN .....</b>	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Progress Capaian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024 .....	8
Tabel 2. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Ketua Triwulan 3 Tahun 2024 .....	12
Tabel 3. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 2 Ketua Triwulan 3 Tahun 2024 .....	15
Tabel 6. Pagu dan Realisasi Indikator Kinerja Ketua Triwulan 3 Tahun 2024.....	15
Tabel 7. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024 .....	16
Tabel 8. Capaian Output Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024 .....	17
Tabel 9. Capaian dan Progres Indikator Kinerja Ketua Triwulan 3 Tahun 2024 .....	20

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B .....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 .....	7

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1. Rencana Aksi Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024.....</b>	<b>23</b>
<b>Lampiran 2. Data Evaluasi Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024 .....</b>	<b>35</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur, adil, dan demokratis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi geografis yang beragam, serta dinamika politik dan sosial di masyarakat merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan.

Pada Triwulan 3 tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, Bawaslu juga berupaya untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui berbagai program dan kegiatan sosialisasi.

Latar belakang penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah selama Triwulan 3 tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi alat evaluasi dan refleksi atas kinerja yang telah dicapai, sekaligus menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan menyusun laporan ini, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu dan Pemilihan, serta berupaya untuk

memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berkualitas di Kabupaten Mamuju Tengah.

## 1.2. MAKSDU DAN TUJUAN

### A. Maksud

Maksud dari pembahasan ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan teknis pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan Badan Ad-Hoc se Kabupaten Mamuju Tengah. Pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan cakupan pengawasan yang dilakukan di berbagai daerah, serta untuk memastikan bahwa semua tahapan Pemilu/Pilkada diawasi dengan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### B. Tujuan

#### 1) Menilai cakupan pengawasan:

- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih.

#### 2) Mengevaluasi efektivitas pengawasan:

- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh Wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih.

#### 3) Mengidentifikasi tantangan dan kendala:

- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih.

#### 4) Memberikan rekomendasi perbaikan:

- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
  - Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih.
- 5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas:
- Menilai sejauh mana kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada telah dilaksanakan di seluruh wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah.
  - Mengidentifikasi daerah yang telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan regulasi dan yang memerlukan perhatian lebih..

### **1.3. TUGAS DAN FUNGSI**

- A. Tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
- 1) Mengawasi penyelenggaraan pemilu:
  - 2) Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
  - 3) Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu:
  - 5) Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
  - 6) Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 7) Menindak pelanggaran pemilu:
  - 8) Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
  - 9) Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 10)Menjaga independensi dan netralitas:

11) Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.

12) Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Fungsi Bawaslu Kabupaten

### 1) Fungsi Pengawasan

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2) Fungsi Pencegahan

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3) Fungsi Penindakan

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4) Fungsi Koordinasi

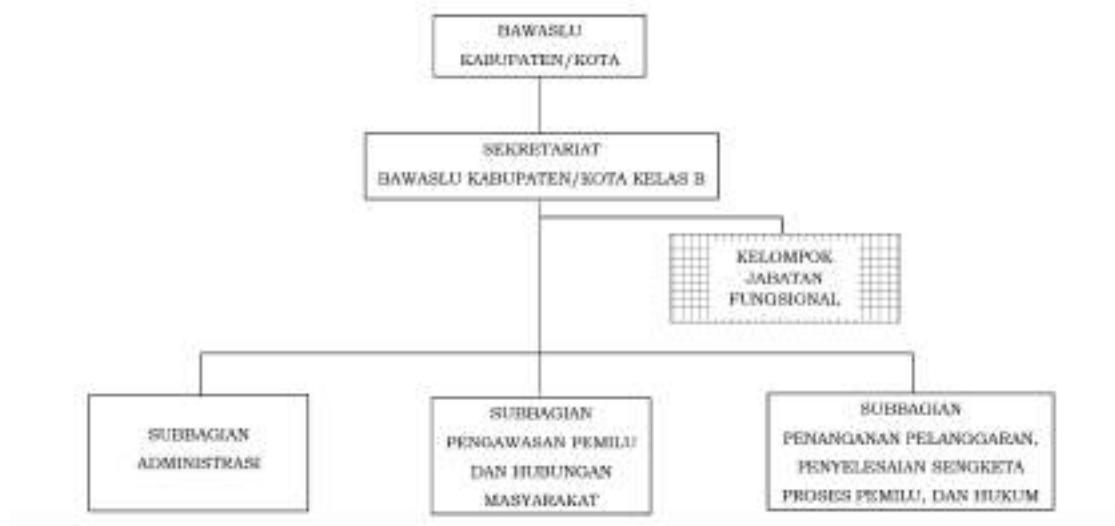
- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
- Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 5) Fungsi Penyelesaian Sengketa

- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
  - Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Fungsi Evaluasi dan Pelaporan
- Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah Kabupaten, termasuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu.
  - Memastikan bahwa seluruh proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.4. STRUKTUR ORGANISASI**

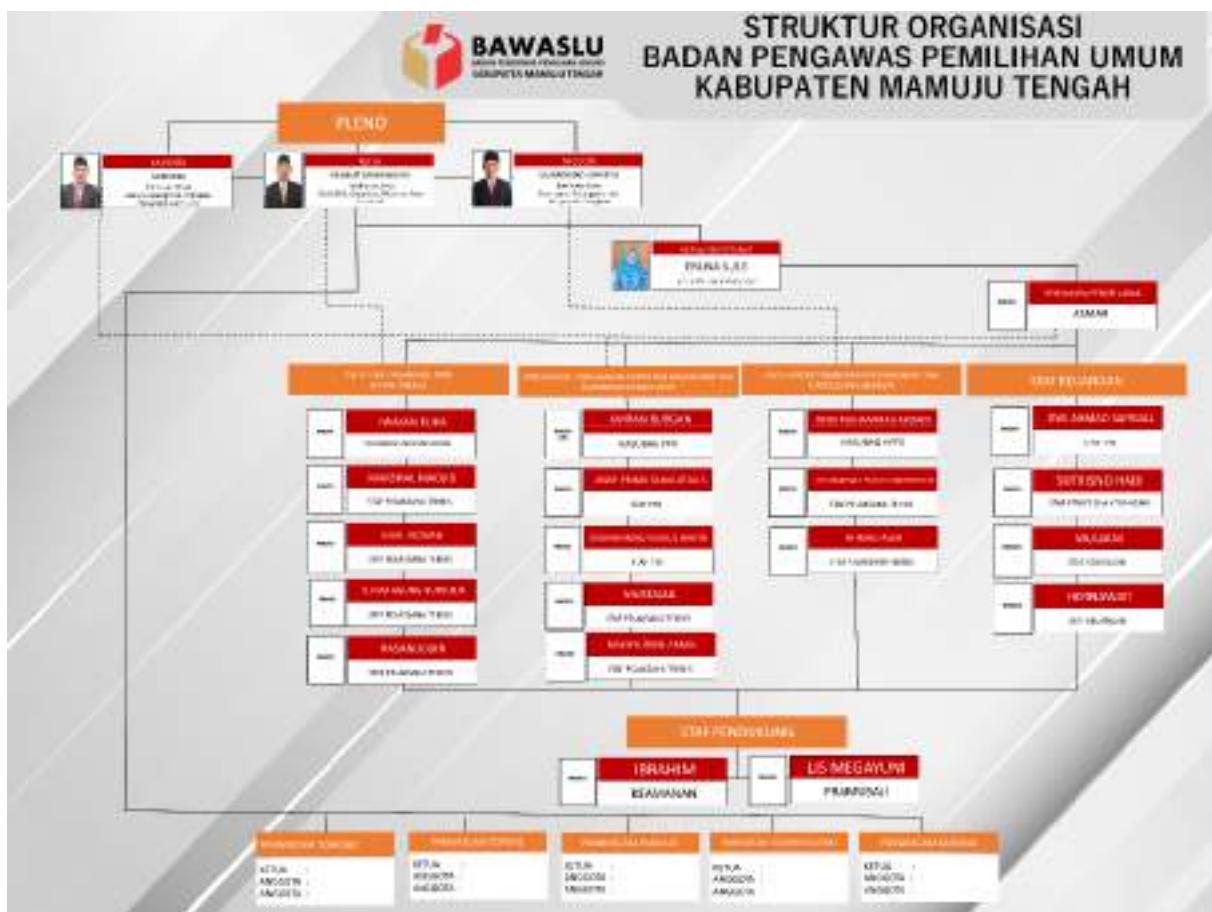
Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Hal tersebut menjadikan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah termasuk pada jenis komisioner berjumlah 3 orang yaitu Ketua dan 2 Anggota dengan didukung oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kelas B dengan Sub Bagian Administrasi, Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Subbagian Penanganan Pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Hukum. Berikut Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota.



*Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Tipe B*

(Sumber : Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2023)

Berdasarkan Struktur tersebut, disusunlah Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :



*Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024*

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

## BAB II

# DATA ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### 2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Jadi, Perjanjian kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah merupakan dokumen yang berisikan kontrak kerja dari Bawaslu Republik Indonesia kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja Ketua merupakan dokumen komitmen Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dalam menjalankan amanah yang diberikan Bawaslu Republik Indonesia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Ketua dan Anggota yang berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja Ketua menjadi tolok ukur atas kinerja lembaga, bahan evaluasi kinerja, dan sebagai dasar Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah. Selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah periode tahun 2024 serta dapat menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Adapun Capaian Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024 oleh adalah sebagai berikut:

*Tabel 1. Progress Capaian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d. TW 3	Progres s.d. TW 3 (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6	5	85
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	83%	83%

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

## 2.2. PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA PER SASARAN KEGIATAN

Untuk menentukan Pencapaian kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, terlebih dahulu harus ditentukan sasaran Kegiatan yang menjadi indikator penilaian pada komponen komponen pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) yang sudah disusun dengan memperhatikan progres Output dan Capaian Output yang berjalan pada Triwulan 3 untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian pada Indikator terkait. Berikut akan dijelaskan secara rinci capaian kinerja per sasaran kegiatan pada Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 tahun 2024.

SASARAN 1		
Sasaran Strategis	Capaian	
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	84%	
INDIKATOR 1		
Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		
Target : 6	Realisasi : 5	Presentase : 85%

Pengawasan Pemilu/Pilkada merupakan salah satu tugas utama Bawaslu yang bertujuan untuk memastikan setiap tahapan Pemilu/Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan teknis pengawasan ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, Badan AdHoc yang meliputi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS se Kabupaten Mamuju Tengah. Pada Triwulan 3 tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan berbagai kegiatan teknis pengawasan di seluruh daerah di Kabupaten Mamuju Tena.

Capaian Jumlah Daerah pada Triwulan 3 tahun 2024, jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan Pemilu/Pilkada di bawah pengawasan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai selesai Tahapan Pemilu/Pilkada Tahun 2024 sehingga Output yang dapat diakui mencapai 5 (Lima) Daerah yang meliputi:

- 1) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang meliputi Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale,

Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo melaksanakan kegiatan teknis pengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2) Kegiatan Teknis Pengawasan Pemilu yang dijalankan meliputi :

- Pengawasan Pendaftaran Pemilih;
- Pengawasan Pencalonan:
- Pengawasan Kampanye:
- Pengawasan Distribusi Logistik;
- Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

3) Tantangan dan Kendala

- Keterbatasan Sumber Daya
- Kondisi Geografis

Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc sejatinya ditentukan oleh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing posisi dalam menjalankan pengawasan Penyenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 karena baik dari DKPP, KPU dalam Hal ini KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah punya tugas fungsi masing-masing dan harus bersinergi.

Jumlah Daerah yang dapat diakui/diklaim melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Regulasi adalah sebanyak 5 (lima) Daerah yaitu Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Topoyo yang meliputi Panwaslu kecamatannya, Panwaslu Kelurahan Desa dan Pengawas TPS pada masing-masing kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah.

Hal ini berdasarkan pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang sudah berjalan yang meliputi Pengawasan Masa Kampanye Pemilu, Pengawasan Masa Tenang, Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Pengawasan Logistik yang telah dilakukan dengan Baik Oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Sementara itu, Pelaksanaan Pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Belum sepenuhnya diselesaikan Terutama pada Pengawasan pengucapan sumpah/janji

Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD. Untuk Kabupaten Mamuju Tengah, tidak diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU) dikarenakan tidak terdapat temuan terkait keabsahan hasil Pemilu Tahun 2024. Hal ini menyebabkan 1 Daerah yaitu Kabupaten Mamuju Tengah sendiri belum dapat diakui sudah tercapai.

Pada Indikator ini juga terdapat Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 sudah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dikarenakan Tahapan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 sehingga perhitungan Jumlah Daerah yang dapat diakui/diklaim melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Regulasi pada Badan Ad-Hoc yaitu dari Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Karossa, Kecamatan Pangale, Kecamatan Tobadak dan Kecamatan Topoyo yang meliputi :

1) Kegiatan Teknis Pengawasan Pemilihan yang dijalankan meliputi :

- Pengawasan Pendaftaran Pemilih;
- Pengawasan Pencalonan:
- Pengawasan Kampanye:
- Pengawasan Distribusi Logistik;

2) Tantangan dan Kendala

- Keterbatasan Sumber Daya
- Kondisi Geografis

Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan terutama pada Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sudah dilakukan secara kontinu dan intens terutama berkaitan dengan adanya berbagai kepentingan daerah didalamnya baik dalam hal Pemutakhiran Pemilih yang sampai pada DPR sejumlah 97.198 Pemilih sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 366/PL.01.2-BA/7606/3/2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Pelaksanaan Pencalonan Pengawasan Kampanye dan Pengawasan Distribusi Logistik, Sudah Dibentuk Juga Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa

pada Pemilihan Tahun 2024, Penguatan Kapasitas dan Rapat Kerja Teknis pada Badan Ad-Hoc serta Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang sementara dalam tahap pengumuman. Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan pada yang berkaitan dengan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan, Pengawasan Pemilihan Partisipatif, Koordinasi dengan Stakeholder dan Kegiatan yang bersifat Koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai Pihak dalam hal pencegahan adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga senantiasa melakukan imbauan dan Pencegahan Netralitas ASN, TNI dan Polri, Pengawasan Netralitas Penjabat Daerah dan Kepala Desa, Pengawasan Isu-Isu Negatif dan Pengawasan Saber. Berikut Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024.

*Tabel 2. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 1 Ketua Triwulan 3 Tahun 2024*

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja TW 3		Progres TW 3
	Target	Realisasi	
Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6	5	85%

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

SASARAN 1	
Sasaran Strategis	Capaian
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	84%
INDIKATOR 2	
Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	
<b>Target</b> : 100%	<b>Realisasi</b> : 83%
	<b>Presentase</b> : 83%

Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah serta Badan Adhoc baik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS se-Kabupaten Mamuju Tengah sudah dilaksanakan dengan realisasi 99% yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan Fungsi Utama Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan rincian :

1. Pengawasan Logistik dan Distribusi Logistik meliputi :
  - Pengawasan Perencanaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
  - Pengawasan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
  - Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu;
2. Pengawasan Masa Kampanye Meliputi :
  - Pengawasan pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;
  - Materi Kampanye Pemilu; dan
  - Pelaksanaan metode Kampanye Pemilu
3. Pengawasan Masa Tenang dalam hal melakukan patroli Pengawasan Masa Tenang dan Apel Siaga
4. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Meliputi :
  - Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara
  - Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara
  - Pengawasan Persiapan Perhitungan Suara
  - Pengawasan Pelaksanaan Perhitungan Suara
5. Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi.

6. Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD dengan rincian:

- Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji DPRD Kabupaten Mamuju Tengah
- Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji DPRD Provinsi Sulawesi Barat Oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat
- Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji DPD, DPR, Presiden dan Wakil Presiden Oleh Bawaslu RI.

Sedangkan pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sudah dilaksanakan sebesar 62.5% dengan tahapan yang sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang sudah dilaksanakan meliputi :

1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
4. proses penetapan calon;
5. pelaksanaan kampanye;
6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusianya;
7. pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota

Berdasarkan Hal tersebut, Pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah pada Triwulan 3 Tahun 2024 dilaksanakan sebesar 83% dengan rincian Capaian dan Progres Kinerja Indikator 2 Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024 Sebagai Berikut :

*Tabel 3. Capaian dan Progres Kinerja Indikator 2 Ketua Triwulan 3 Tahun 2024*

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja s.d TW 3		Progres s.d TW 3
	Target	Realisasi	
Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100%	83%	83%

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

### **2.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN CAPAIAN OUTPUT**

#### A. Alokasi Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja

Berdasarkan Realisasi pada FA Detail SAKTI per 30 September 2024 disajikan Anggaran dan Realisasi per Indikator Kinerja dengan memperhatikan setiap Komponen yang mendukung Indikator Ketua dan Mengelompokkannya. Setiap Realisasi yang ditampilkan bisa terdiri dari Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53), per 30 September 2024 Sudah Belanja Hibah setelah dilakukan Revisi Penambahan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Secara Umum Pagu dan Realisasi berdasarkan Indikator Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

*Tabel 4. Pagu dan Realisasi Indikator Kinerja Ketua Triwulan 3 Tahun 2024*

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	5,789,652,000	1,568,778,925
	Percentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	3,779,644,000	3,155,779,209

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

## B. Alokasi Anggaran per Jenis Belanja

Berdasarkan Realisasi pada OM SPAN per 30 September 2024 secara Kas disajikan Alokasi Anggaran per Jenis Belanja pada APBN dan APBD Tahun 2024. Setiap Realisasi yang ditampilkan bisa terdiri dari Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) yang disandingkan dengan Rencana Penarikan Dana Bulanan.

Per 30 September 2024 Sudah ada Belanja Hibah dikarenakan setelah dilakukan Revisi Penambahan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024. Secara Umum Alokasi Anggaran per Jenis Belanja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Maret 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	RPD s.d. TW 3 (Rp)	Realisasi s.d. TW 3 (Rp)	%	GAP
Belanja Pegawai	1.286.087.000	1.286.088.000	1.019.017.661	79,23	-20,77
Belanja Barang	12.352.168.000	9.469.803.000	7.029.178.330	56,91	-19,76
Belanja Modal	244.309.000	238.648.000	228.453.000	93,51	-4,17
<b>Total</b>	<b>13.882.564.000</b>	<b>10.994.539.000</b>	<b>8.276.648.991</b>	<b>59,62</b>	<b>-19,58</b>

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

## C. Capaian Output

Tabel 6. Capaian Output Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024

Program/Kegiatan/ Rincian Output	RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target		Anggaran (ribu rupiah)	Realisasi Anggaran					
				(angka)	(%)		(ribu rupiah)	(%)				
<b>5245 Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>												
BAH Pelayanan Publik Lainnya												
001 Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Bukan PN	2	Layanan	1	75.00	8,573,000	3,728,200	65.49				
<b>BIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>												
003 Pengawasan Pilkada Serentak - Kabupaten/Kota 01	Bukan PN	1	Lembaga	0	62.50	5,759,629,000	1,554,896,220	27.00				
BKC Pemantauan lembaga												
001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Bukan PN	5	Laporan	3	71.14	21,450,000	10,154,505	47.34				
<b>6661 Perencanaan, Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</b>												
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
001 Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	PN	10	Lembaga	9	85.00	2,675,509,000	2,155,958,749	85.29				
003 Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	PN	54	Laporan	54	100.00	263,625,000	263,625,000	100.00				
<b>6843 Pengawasan Masa Kampanye Pemilu</b>												
QCE Penanganan Perkara												
001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	PN	1	Perkara	1	100.00	101,870,000	93,802,275	88.23				
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
001 Pengawasan Masa Kampanye	PN	6	Laporan	6	100.00	129,605,000	122,896,500	84.66				
<b>6844 Pengawasan Masa Tenang</b>												
QCE Penanganan Perkara												
001 Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	PN	4	Perkara	4	100.00	52,030,000	44,000,000	73.35				
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
001 Pengawasan Masa Tenang	PN	6	Laporan	6	100.00	36,555,000	32,625,000	77.16				
<b>6845 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara</b>												
QCE Penanganan Perkara												
001 Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	PN	3	Perkara	3	100.00	53,295,000	43,315,200	62.26				
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
001 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	PN	8	Laporan	8	100.00	229,010,000	216,475,000	94.53				

Program/Kegiatan/ Rincian Output	RO PN/tidak	Target	Satuan	Capaian Target		Anggaran (ribu rupiah)	Realisasi Anggaran					
				(angka)	(%)		(ribu rupiah)	(%)				
<b>6846 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu</b>												
QCE Penanganan Perkara												
001 Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	PN	2	Perkara	2	100.00	10,893,000	7,095,000	48.95				
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
001 Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	PN	5	Laporan	5	100.00	32,185,000	20,655,000	38.46				
<b>6847 Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota</b>												
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
001 Publikasi Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	PN	1	Laporan	0	32.00	11,280,000	0	0				
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
002 Pengawasan Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	PN	1	Laporan	0	31.76	18,070,000	0	0				
<b>6848 Pengawasan Logistik</b>												
QCE Penanganan Perkara												
001 Penanganan Pelanggaran Logistik	PN	2	Perkara	2	100.00	9,480,000	5,120,000	30.54				
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga												
001 Pengawasan Logistik	PN	7	Laporan	7	100.00	156,237,000	150,211,485	84.56				

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah)

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. KESIMPULAN**

Pada Triwulan 3 tahun 2024 Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan rencana kerja dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan yaitu terdapat 5 (lima) Daerah yang dikelompokkan yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi dengan 1 Daerah yaitu Kabupaten Mamuju Tengah Diakui di Akhir Tahun Anggaran 2024 serta Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang sudah mencapai 83 Persen. Beberapa pencapaian utama meliputi:

- 1) Pengawasan Pemilu yang Efektif: Berbagai tahapan Pemilu dan Pemilihan telah diawasi dengan ketat, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye serta Pengawasan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan proses Pemilu dan Pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Kerjasama dan Koordinasi yang Baik: Bawaslu telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk KPU, pemerintah daerah, dan instansi lainnya, guna mendukung pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang lebih efektif.

Laporan Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dari 2 indikator Capaian Kinerja Ketua. Hal ini menjadi sorotan tersendiri dalam melaksanakan Kinerja yang memaksimalkan adanya anggaran dengan tetap memperhatikan efektif efisien. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Realisasi dan Progres Indikator Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel 7. Capaian dan Progres Indikator Kinerja Ketua Triwulan 3 Tahun 2024*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi s.d. TW 1	Progres s.d. TW 1 (%)
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6	5	85
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota	100%	83%	83%

### 3.2. SARAN/REKOMENDASI

Adapun rekomendasi untuk Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

- 1) Penambahan Sumber Daya: Diperlukan penambahan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih optimal. Hal ini penting untuk mengatasi keterbatasan yang saat ini dihadapi dan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu.
- 2) Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Penggunaan sistem informasi yang lebih canggih dapat membantu dalam mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan efisiensi kerja.
- 3) Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan mendukung transparansi dalam proses Pemilu.
- 4) Program Sosialisasi dan Edukasi: Mengadakan lebih banyak program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dapat membantu mencegah pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilu.

- 5) Penguatan Manajemen Internal: Perlu dilakukan penguatan manajemen internal Bawaslu, termasuk peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja, untuk memastikan semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.
- 6) Dengan mengikuti rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dapat meningkatkan kinerja pengawasannya dan berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkualitas. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Rencana Aksi Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas		PELAKSANAAN										PAGU										
					TW 1			TW 2			TW 3			TW 4											
			Realisasi Indikator		0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	1 Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi			1	5245.BAH.001	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,785,000		
					2		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,788,000		
		5245.BIC.003		3	301		Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	715,200,000			
				4	302		Honorarium Kesekretariatan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	485,500,000			
				5	303		Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	394,000,000			
				6	304		Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	22,722,000			
				7	305		Perencanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran serta Revisi Anggaran	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13,992,000			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU													
				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4														
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah	1	Daerah	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES		
			Realisasi Indikator	306	Sewa Gedung Kantor, Meubelair, dan Peralatan Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	288,000,000													
				307	Sewa Kendaraan Operasional dan/atau Kendaraan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	47,120,000													
				310	Pelayanan Operasional Perkantoran	0	0	0	0	0	0	1	1	579,367,000													
				311	Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan Pengawas TPS	0	0	0	0	0	0	1	0	202,645,000													
				312	Pelantikan dan Penguatan Kapasitas bagi Aparatur Pengawas Pemilihan dan Kesekretariatan	0	0	0	0	0	0	1	0	648,685,000													
				313	Advokasi dan Pendampingan Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	27,209,000													
				314	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	204,285,000												
				315	Pengawasan Pemilihan Partisipatif	0	0	0	0	0	0	1	1	1	321,595,000												
				316	Musyawarah Penyelesaian Sengketa	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800,000													

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU																
				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4																	
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah	1	Daerah	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES					
			Realisasi Indikator	317	Penindakan Pelanggaran Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	20,800,000													
				318	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	316,592,000											
				319	Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	353,765,000											
				320	Koordinasi dengan Stakeholder	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	72,000,000											
				321	Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	37,050,000											
				322	Perjalanan Dinas/Transpor dalam Rangka Konsultasi/Undangan/Pengawasan/Fasilitasi Pendampingan Hukum/Panggilan Sidang Kode Etik	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	997,302,000											
			5245.BKC.001	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,466,000											
				302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7,765,000											
				303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,025,000											

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas		PELAKSANAAN																PAGU			
					TW 1		TW 2		TW 3		TW 4													
			Realisasi Indikator		0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
2	Percentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panawaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	6661.QIC.001	26	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,544,000
			27	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4,650,000
			Indikator Kinerja		Realisasi Indikator		25	Persen		25	Persen		25	Persen		25	Persen		Persen		Persen		3,779,644,000	
			1	6661.QIC.001	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,140,000
			2		302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,121,000
			3		303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,734,000
			4		304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,650,000
			5		305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,589,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU		
				TW 1		TW 2		TW 3			TW 4					
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah					
6	Realisasi Indikator			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	5,789,652,000
				306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	97,710,000
				307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,810,024,000
				308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	259,766,000
				401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	21,275,000
				402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	77,500,000
11	6661.QIC.003	401	Rekrutmen panwaslu PTPS (Kecamatan)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,625,000	
12	6843.QCE.001	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU		
				TW 1		TW 2		TW 3			TW 4					
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah					
			Realisasi Indikator	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	5,789,652,000
13	6843.QIC.001	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,310,000
			303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000
			304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,460,000
		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,970,000
			302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,585,000
		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,850,000
			401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU		
				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah	5	Daerah	5,789,652,000		
			Realisasi Indikator	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
				20	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26,250,000
				21	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	56,700,000
				22	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	450,000
				23	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	38,770,000
				24	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	600,000
				25	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12,210,000
				26	6844.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU										
				TW 1		TW 2		TW 3			TW 4													
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
			Realisasi Indikator	302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000
				303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000
				401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,125,000
				402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000
				501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000
				301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
				302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,945,000
				6845.QCE.001																				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU		
				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4			
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah	5	Daerah	5,789,652,000		
			Realisasi Indikator	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	
		6845.QIC.001	34	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
			35	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,275,000
			36	302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9,725,000
			37	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4,685,000
			38	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7,125,000
			39	402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000
			40	403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	117,450,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU			
				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4				
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah	5	Daerah	5,789,652,000			
			Realisasi Indikator	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES		
				41	501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000	
				42	601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	62,250,000	
				43	6846.QCE.001	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	4,733,000
				44		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	6,160,000
				45	6846.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	3,750,000
				46		302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	7,200,000
				47		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	0	1	1	1	1	1	0	0	0	4,380,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU					
				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4						
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah								
Realisasi Indikator						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	5,789,652,000	
			48	304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9,730,000	
			49	401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	7,125,000	
			50	6847.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	11,280,000	
			51	6847.QIC.002	301	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	18,070,000	
			52	6848.QCE.001	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
			53		302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8,880,000
			54	6848.QIC.001	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4,470,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Aktifitas	PELAKSANAAN										PAGU		
				TW 1		TW 2		TW 3			TW 4					
				0	Daerah	0	Daerah	5	Daerah	1	Daerah					
			Realisasi Indikator	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES	5,789,652,000
			55	302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	29,442,000
				303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	18,150,000
				401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	7,125,000
				402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	18,600,000
				501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000
				601	Pengawasan logistik (TPS)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	62,250,000

## Lampiran 2. Data Evaluasi Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3 Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Keuangan			KETERANGAN
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaran Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6	5	85%	5,789,652,000	,568,778,925	27.10%	Jumlah Daerah yang melaksanakan Kegiatan Teknis Pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan regulasi adalah sejumlah 5 Badan Ad-Hoc, dengan pelaksanaan Pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan pada setiap Tahapan pada Bawaslu Kabupaten masih sementara Berjalan.
		Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100%	83%	83%	3,779,644,000	3,155,779,209	83.49%	Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah baik Pemilu maupun Pemilihan yang sementara berjalan



**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamuju Tengah**



**Laporan Kinerja Ketua Bawaslu  
Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3  
Tahun 2024**



Bawaslu Mamuju Tengah



bawaslu\_mateng



mamujutengah.bawaslu.go.id

**Cegah  
Awasi  
Tindak!**



**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamuju Tengah**



**Laporan Kinerja Ketua Bawaslu  
Kabupaten Mamuju Tengah Triwulan 3  
Tahun 2024**



Bawaslu Mamuju Tengah



bawaslu\_mateng



mamujutengah.bawaslu.go.id

**Cegah  
Awasi  
Tindak!**